

## TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

2020

PERBUP NO. 47 BD. 2020. NO. 47 LL. KAB. PEMALANG : 97 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

ABSTRAK : - Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 Tahun 2014; Perda No. 1 Tahun 2015.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ketertiban Umum, Tim Pemeriksa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, Interval Waktu Pemilihan Kepala Desa Secara Bergelombang, Pembentukan Panitia Pemilihan, Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten, Pembentukan Tim Pengawas Desa, Pembentukan Tim Pengawas Kecamatan, Pemungutan Suara Serentak, Pemilihan Kepala Desa Dimajukan, Persyaratan dan Pencalonan Kepala Desa, Mekanisme Pemilihan Kepala Desa, Saksi, Pelaksanaan Pemungutan Suara, Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah, Biaya Pemilihan Kepala Desa, Pencalonan dalam Pemilihan Umum dan Izin dalam Pemilihan Kepala Desa, Izin Perkawinan dan Perceraian Kepala Desa, Teguran bagi Kepala Desa, Pemberhentian Sementara Kepala Desa, Mekanisme Pemberhentian Kepala Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa, Izin Pencalonan Kepala Desa Bagi PNS, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 1 September 2020  
- Perbup No. 36 Tahun 2015 dan Perbup No. 15 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku  
- Terdiri dari 162 Pasal  
- Lampiran 29 halaman.